



PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA DAN PDTT BELANJA SEMESTER II 2016

Pontianak (21/12/16)- Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat pada hari ini, Rabu 21 Desember 2016 telah menyerahkan hasil Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Belanja Daerah, kepada sembilan entitas yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat **Dra. Ida Sundari, M.M**, bertempat di Ruang Rapat Pimpinan Lantai 2 Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.

Area, tujuan dan hasil Pemeriksaan Kinerja yang telah dilakukan pada enam entitas sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Pemerintah Kota Pontianak dan Kabupaten Sambas Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk menilai efektivitas Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kepada Peserta Program JKN pada Pemerintah Kota Pontianak dan Kabupaten Sambas. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa masih terdapat kondisi yang perlu diperbaiki/ditingkatkan agar sesuai dengan standar dan lebih memadai pada aspek penyelenggaraan Program JKN yang meliputi, jumlah dan kualitas SDM, sarana dan prasarana dalam pemberian pelayanan kesehatan, kebutuhan farmasi untuk mendukung pelayanan kesehatan, pengelolaan pembiayaan untuk mendukung pelayanan kesehatan, data kepesertaan JKN, kebijakan teknis dalam mendukung pelayanan kesehatan peserta JKN di RSUD, serta monitoring dan evaluasi secara berkala.
2. Pemeriksaan Kinerja atas Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas Tahun Anggaran 2014 s.d 2016 (Semester I) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Melawi. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk menilai efektivitas pemenuhan sarana dan

Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

Jalan Ahmad Yani Pontianak Kalimantan Barat

Telepon 0561-585349, Faksimile 0561-713598, Website www.pontianak.bpk.go.id

prasarana dalam rangka peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sekadau dan Melawi. Pemeriksaan mencakup pendidikan formal jenjang SD, SMP, SMA dan SMK dan pendidikan kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C) dibawah naungan Kemendikbud untuk Tahun Anggaran 2014 s.d. 2016 (Semester I). Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa masih terdapat kondisi yang perlu diperbaiki/ditingkatkan agar sesuai dengan standar dan lebih memadai serta berkualitas, terkait dengan pemenuhan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah, aspek kebijakan dan perencanaan, kelembagaan, tata laksana dan sumber daya, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi.

3. Pemeriksaan Kinerja atas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan/Hinder Ordonantie (HO) Tahun Anggaran 2015 dan 2016 (Semester I) pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Ketapang dan instansi terkait lainnya. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk menilai efektivitas pelayanan IMB dan HO pada Kantor Pelayanan Terpadu dan instansi terkait lainnya. Lingkup pemeriksaan meliputi kelembagaan dan sumber daya dalam rangka pelayanan IMB dan HO, kegiatan pelaksanaan pelayanan IMB dan HO, serta monitoring dan evaluasi pelayanan IMB dan HO. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa masih terdapat kondisi yang perlu diperbaiki/ditingkatkan agar sesuai dengan standar dan lebih memadai serta efektif pada aspek struktur organisasi, penyusun Rencana Strategis Tahun 2016-2020, sumber daya manusia dan sarana prasarana, pelaksanaan pelayanan IMB dan HO, media penyebaran informasi, kepuasan masyarakat, pelaporan dan pengarsipan dokumen, penanganan pengaduan serta kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan.

Untuk PDDT atas Belanja Daerah yang telah dilaksanakan pada Semester II 2016 ini pada tiga entitas yaitu Kota Singkawang, Kabupaten Kubu raya dan Kabupaten Sintang. Tujuan pemeriksaan atas Belanja Daerah adalah untuk menilai sistem pengendalian intern atas pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja daerah, apakah telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai dan kesesuaian pelaksanaan belanja daerah dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Secara umum, hasil pemeriksaan atas belanja daerah menunjukkan bahwa

Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

Jalan Ahmad Yani Pontianak Kalimantan Barat

Telepon 0561-585349, Faksimile 0561-713598, Website www.pontianak.bpk.go.id

terdapat beberapa temuan yang termasuk dalam kategori kerugian keuangan negara/daerah dan potensi kerugian keuangan negara/daerah. Temuan-temuan yang berpotensi merugikan keuangan negara/daerah antara lain: Penatausahaan kegiatan tidak sesuai ketentuan, dan Standar Pembiayaan kegiatan yang belum diatur oleh Pemerintah Daerah.

Adapun temuan-temuan yang termasuk kategori kerugian negara/daerah antara lain: Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas, Pemahalan Harga Satuan Pengadaan Barang, Kekurangan Volume Pekerjaan Fisik dan/atau barang dan Kelebihan Pembayaran Pekerjaan selain Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang.

Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa Pengelolaan Belanja Daerah belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Pada paparan Kepala Perwakilan, disampaikan juga bahwa hasil pemeriksaan Semester II Tahun 2016 ini akan mendukung pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sebentar lagi akan dilaksanakan pemeriksaan pendahuluannya. Untuk itu diharapkan agar temuan-temuan tersebut dapat segera ditindaklanjuti. Hal ini demi baiknya tata kelola keuangan daerah dan demi menghindari *financial distress* di masa yang akan datang. Kegagalan dalam pengelolaan keuangan daerah bisa mempengaruhi penilaian BPK RI atas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

Jalan Ahmad Yani Pontianak Kalimantan Barat

Telepon 0561-585349, Faksimile 0561-713598, Website www.pontianak.bpk.go.id